

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK KANTOR CABANG MAKASSAR

ARIO WAHYUDI



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK KANTOR CABANG MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ARIO WAHYUDI
A31107023**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK KANTOR CABANG MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

**ARIO WAHYUDI
A31107023**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 18 Agustus 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alimuddin, S.E., MM., Ak.
NIP 195912081986011003

Muh. Achyar Ibrahim, M.si., Ak.
NIP 196012251992031007

**KETUA JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.
NIP 196305151992031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ario Wahyudi

NIM : A311 07 023

Jurusan/program studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini berjudul

Analisis Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Muamalat IndonesiaTBK Kantor Cabang Makassar

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dilakukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 18 Agustus 2013
Yang membuat pernyataan

Ario Wahyudi

Ario Wahyudi

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH S.W.T, yang telah melimpahkan taufiq dan hidayahnya. Berkat rahmat dan petunjuknya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar. Judul Skripsi yang diangkat adalah “Analisis Penerapan Bagi hasil Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT Bank Muamalat Indonesia TBK kantor cabang Makassar”

Shalawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran, untuk seluruh umat manusia, yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Skripsi ini merupakan salah satu tugas yang wajib ditempuh oleh mahasiswa untuk meraih Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Dan melalui prakata ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk semua pihak tanpa terkecuali atas segala bantuannya

Pertama-tama, ucapan terima kasih berikan kepada bapak DR.Alimuddin, SE., MM., Ak selaku Pembimbing satu dan Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak. Selaku Pembimbing dua yang memberikan waktu untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Terakhir. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua bapak dan mama beserta saudara-saudari saya yang memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan Usulan Skripsi ini. Dan semoga semua mendapatkan kebaikan dari-NYA atas bantuan yang di berikan hingga Usulan Skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi terwujudnya karya yang lebih baik di masa mendatang.

Wabillahi Taufik Walhidayah.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Agustus 2013

Ario Wahyudi

ABSTRAK

Analisis Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Muamalat IndonesiaTBK Kantor Cabang Makassar

Application Analysis of Revenue Sharing Financing Musyarakah at PT Bank Muamalat IndonesiaTBK Makassar Branch Office

**Ario wahyudi
Alimuddin
Muh. Achyar Ibrahim**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang penerapan bagi hasil Pembiayaan *Musyarakah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Makassar dan apakah telah sesuai dengan nilai Islam. Data ini diperoleh data primer yang diperoleh melalui pengamatan atau wawancara secara langsung dengan pegawai yang mempunyai wewenang untuk memberikan data, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen atau arsip instansi yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini yang diperlukan dalam penulisan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bagi hasil pembiayaan *musyarakah* terdiri dari fitur produk, akad pembiayaan *musyarakah*, penentuan bagi hasil dan penerapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* yang telah sesuai berdasarkan nilai Islam (Al-Qur'an-Hadits dan FATWA DSN MUI).

Kata Kunci: fitur produk, akad pembiayaan *musyarakah*, penentuan bagi hasil, penerapan bagi hasil, nilai Islam (Al-Qur'an-Hadits dan Fatwa DSN MUI).

This research aims to identify and provide an overview of the results of the application of Musharaka financing at PT Bank Muamalat Indonesi Tbk Makassar Branch Office and whether in accordance with Islamic values. This data is collected primary data obtained through direct observation or interviews with employees who have the authority to provide the data, and secondary data is data obtained through archival documents or agency in connection with the discussion of this thesis is required in writing. The findings of this study indicate that the variable results Musharaka financing consists of product features, Musharaka financing agreement, the determination of the results and the application of the results that are compliant Musharaka financing based on the value of Islam (the Qur'an and the Hadith FATWA DSN-MUI).

Keyword: *product features, musyarakah financing agreement, the determination of profit sharing, application sharing, the value of Islam (the Qur'an and the Hadith DSN-MUI).*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	5
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Bank Syariah	7
2.1.1. Pengertian Bank Syariah	7
2.1.2. Karakteristik Bank syariah.....	8
2.1.3. Prinsip-Prinsip Bank Syariah.....	8
2.1.4. Produk Bank syariah	9
2.1.5. Pembiayaan di Bank Syariah	14
2.1.6. Sistem Pembiayaan di Bank Syariah	16
2.2. Pengertian dan Jenis Bagi Hasil	18
2.2.1. Pengertian dan Jenis Bagi Hasil	19
2.2.2. Jenis Bagi Hasil	20
2.3. Pengertian dan Jenis Syirkah/ Musyarakah	22
2.3.1. Jenis-Jenis Pembiayaan Musyarakah	23
2.3.2. Pengakuan dan Pengukuran.....	26
2.3.3. Penyajian	28
 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1. Lokasi Penelitian.....	29
3.2. Sumber Data	29
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.4. Waktu Penelitian.....	30

3.5. Metode Analisis Data	30
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN.....	31
4.1. Gambaran Umum Perusahaan	31
4.1.1. Sejarah dan Gambaran Umum PT Bank Muamalat Indonesia	31
4.1.2. Visi dan Misi.....	33
4.1.3. Struktur Organisasi BMI cabang Makassar	34
4.1.4. Pembagian Tugas.....	35
4.1.5. Letak Kantor	36
4.1.6. Neraca dan Laporan Kinerja dalam Perspektif Produknya	37
4.1.7. Laporan Laba Rugi	42
4.1.8. Skema Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia	46
4.1.9. Fitur Produk Musyarakah	47
4.2. Hasil Penelitian	47
4.2.1. Prinsip Operasional Bank Muamalat Indonesia	47
4.2.2. Jenis Pembiayaan pada Bank Muamalat	48
4.2.3. Pembiayaan Musyarakah.....	49
4.2.4. Penetapan Nisbah Bank Muamalat Indonesia.....	49
4.2.5. Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah.....	50
4.3. Pembahasan	51
4.3.1. Analisis Kesesuaian Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Dengan Nilai Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits dan Fatwa MUI).....	51
4.3.2. Analisis kesesuaian Fitur Produk/ Mekanisme akad Pembiayaan Musyarakah dengan Nilai Islam	53
4.3.3. Akad Pembiayaan Musyarakah ditinjau dengan Nilai Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits dan Fatwa MUI).....	54
4.3.4. Penentuan Bagi Hasil ditinjau dengan Nilai Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits dan Fatwa MUI)	58
4.3.5. Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah ditinjau dengan Nilai Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits dan Fatwa MUI).	60
BAB VI PENUTUP	63
6.1. Kesimpulan.....	63
6.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN 1	
LAMPIRAN 2	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan merupakan kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara. Jadi dapat dikatakan dalam hal mempercepat dan meningkatkan perekonomian suatu negara, maka bank merupakan hal yang tidak dipisahkan atau dengan kata lain “nyawa” untuk menggerakkan perekonomian suatu negara dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Sistem perbankan di Indonesia dilaksanakan dengan *dual banking system* dimana sistem ini terbagi atas dua yaitu konvensional dan syariah. Sistem ini mulai ada setelah lahirnya UU No.10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Sistem ini menjadi pelopor lahirnya bank syariah di Indonesia.

Sistem bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan, bank konvensional dalam operasionalnya sangat tergantung pada suku bunga yang berlaku, karena keuntungan utama bank konvensional berasal dari selisih antara bunga pinjam dengan bunga simpan. Sedangkan bank syariah dalam operasionalnya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dengan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2005:1).

Bank syariah pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari gagasan bahwa lembaga perbankan konvensional belum mampu memobilisasi umat Islam secara keseluruhan untuk menabung. Perbedaan pendapat tentang bunga bank cenderung mempengaruhi sikap umat Muslim Indonesia pada penggunaan jasa perbankan konvensional. Namun, komisi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merekomendasikan pemberian bunga bank sebagai hukum riba.

Riba dapat menimbulkan sikap mental boros, malas yang mau mendapatkan harta tanpa kerja keras dan menjadi benalu yang tumbuh di atas jerih payah orang lain, dan riba akan membawa akibat buruk, dosa besar dan malapetaka dan menjerumuskan para pelakunya kepada jurang penistaan, serta mendatangkan bahaya bagi pribadi dan masyarakat, baik di dunia dan di akhirat.

Secara umum bank syariah dapat diartikan sebagai media intermediasi yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya dilandasi oleh syariat-syariat Islam baik dalam bentuk jual-beli, bagi hasil maupun sewa-menyewa. Namun secara eksplisit konsep bagi hasil yang benar-benar mewakili konsep Islam dalam perbankan, karena konsep bagi hasil yang menjembatani pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Bank syariah telah menunjukkan trend perkembangan yang positif sehingga dapat memainkan peranan pentingnya dalam memobilisasi, mengalokasi, dan memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik. Salah satu faktor pendukung yang menunjang trend positif ini adalah pembagian hasil usaha dalam pembiayaan yang menggunakan konsep bagi hasil dengan akad *musyarakah*, meski pada awalnya, konsep ini tidak begitu luas dimengerti oleh masyarakat (Hidayat, 2002).

Pembagian hasil usaha dengan ketentuan nisbah pihak penyalur dana (*investor*) dan penerima dana usaha (*debitur*). Sehingga besarnya keuntungan yang diperoleh dipengaruhi oleh hasil usaha yang digunakan.

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syariah, dimana bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis, khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al Qur'an, Surat Al Baqarah ayat 275, dimana Allah SWT mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur-unsur ribawi, karena unsur tersebut tidak mendatangkan kemashlahatan bahkan hanya bisa mendatangkan keburukan, sehingga sedini mungkin harus dihindarkan.

Konsep bagi hasil juga berindikasi jangka panjang sehingga akan mempunyai kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan (Muhammad, 2004:20). Bagi hasil dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai sebuah hubungan kerjasama antara pihak bank (mitra) dengan pihak nasabah (mitra), dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak.

Besarnya nominal yang diterima tentunya menyesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diperoleh usaha yang dikelola bersama. Konsekuensi dari konsep ini adalah jika hasil usaha menunjukkan keuntungan yang besar, maka bagi hasilnya pun akan besar dan sebaliknya jika keuntungan kecil atau bahkan merugi maka pihak peminjam harus ikut pula menanggung kerugian tersebut (Muhammad, 2006 : 18).

Penentuan nisbah bagi hasil harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian dengan pedoman pada kemungkinan untung atau rugi. Sehingga

nasabah akan mendapat kejelasan mengenai besarnya nisbah yang dibagikan, dan masyarakat dengan mudah dapat melakukan usaha sekaligus di bank syariah (Moerdiyanto, 2004: 35). Kejelasan mengenai nisbah bagi hasil ini diharapkan akan tercapai keadilan dalam pembagian keuntungan.

Penulis bertujuan melakukan penelitian pada bank muamalat, karena bank muamalat merupakan pionir perbankan syariah pertama di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan bank-bank syariah dinegara-negara Islam. Pada awal 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam dilakukan. Seiring dengan lajunya perekonomian, maka prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 dalam lokakarya bunga bank dan perbankan tanggal 18-20 Agustus 1990 yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Bogor. Ditindak lanjuti pada 22-25 Agustus 1990 dalam musyawarah nasional IV MUI.

Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menganalisis penerapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah yaitu bank muamalat di Makassar, dimana dalam pengoperasiannya dilandasi oleh prinsip-prinsip syariat Islam. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Makassar”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas. Maka permasalahan yang akan dianalisis Apakah sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesi telah sesuai dengan nilai Islam (Al-quran dan Al-hadits).

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang penerapan bagi hasil Pembiayaan *Musyarakah* pada PT Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Makassar dan apakah telah sesuai dengan nilai Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang maksimal dan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai informasi kepada para pembaca mengenai penerapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Makassar.
2. Sebagai bahan masukan untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang perbankan syariah.
3. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori bank syariah, pengertian dan jenis bagi hasil, pengertian dan jenis syirkah/ *musyarakah*, pengakuan dan pengukuran, dan penyajian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup lokasi penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, waktu penelitian, dan metode analisis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya perusahaan, gambaran secara umum perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi dan pembagian tugasnya, laporan neraca, laporan laba-rugi, skema pembiayaan *Musyarakah*, dan fitur produk pembiayaan *Musyarakah*.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang menjelaskan tentang penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* yang digunakan oleh PT Bank Muamalat kantor cabang Makassar, dan hasil analisa disajikan dalam bentuk deskriptif komparatif atas semua data yang diperoleh dari hasil observasi dengan berpedoman pada landasan teori.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan masalah dalam penelitian serta kebijaksanaan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bank Syariah

2.1.1. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang mana sistem operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Antonio dan Fajar membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.

“Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Antonio, 2001:87)”.

“Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah, secara akademik, istilah Islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama (Fajar, 2007:3)”.

Menurut Ensiklopedi Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam.

“Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Muhammad, 2006 : 5-7)”.

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Sehingga bank syariah ialah badan usaha yang bergerak dalam

bidang perbankan yang sistem operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Tujuan didirikannya bank syariah adalah meningkatkan usaha menuju kesejahteraan umat dengan mangaitkan pembangunan ekonomi dan sosial serta menyelamatkan umat islam dari pembayaran dan menerima bunga yang termasuk perbuatan riba serta dampak sampingnya yang tidak dikehendaki oleh Islam (Muchdarsyah, 1991 : 111)”.

2.1.2. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah didirikan dengan aktivitas yang dibenarkan oleh syariat islam, dimana segala aktivitasnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

- “1. Bersifat produktif, ekonomi Islam memandang semua aktivitas ekonomi harus produktif sehingga lebih ditekankan pada ekonomi riil. Sedangkan bunga merupakan pendapatan yang tidak produktif.
2. Tidak eksploitatif, kegiatan ekonomi tidak boleh ditujukan demi keuntungan suatu pihak lain (sama-sama untung).
3. Berkeadilan, tidak boleh ada transaksi ekonomi yang merugikan pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak bersifat spekulatif, hal ini dianggap sebagai perjudian dan dapat mengakibatkan orang yang melakukannya terancam kemiskinan serta menyebabkan uang atau barang yang dispekulasi menjadi tidak bermanfaat.
5. Anti riba, riba sebenarnya adalah tambahan yang di tetapkan dalam perjanjian atas suatu barang yang dipinjam, ketika barang dikembalikan. Sehingga pemilik barang berharap bahwa dia bisa meraih keuntungan dari transaksi pinjam maminjam tersebut (Fajar, 2006 : 2-5)”.

2.1.3. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- “1. Prinsip keadilan.
Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan *margin* keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.
2. Prinsip Kesederajatan.
Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

3. Prinsip Ketentraman.

Produk-produk perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin (Zulkifli, 2009 : 15 www.syariah.co.id)”.

2.1.4. Produk Bank Syariah

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit units*).

Melalui bank, kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

“Menurut bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kamitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpanan dana. Produk bank syariah terbagi dalam tiga kategori :

- 1) produk penyaluran dana (*financing*),
- 2) produk penghimpunan dana (*funding*),
- 3) produk jasa (*services*). (Sudarsono, 2005 : 61)”.

1. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

Menurut penyaluran pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

- “1. transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli.
2. transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa (Sudarsono, 2005 : 62)”

A. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang, tingkat keuntungan bank yang ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual (Anifa, 2009 : 54).

Menurut transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang, ada tiga jenis jual-beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu :

“a) *Bai, al-murabahah*

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Disini, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di *mark-up*. Dengan kata lain penjual barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *costplus profit*.

b) *Bai' As-Salam*

Definisi salam adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, dalam majlis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan, dimana barang pesanan. Menurut sayyid sabiq *as-salam* dinamai juga *as-salaf* (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan (Mahkrus dalam Sudarsono, 2005 : 63).

c) *Bai' Al-Istishna'*

Menurut jumhur ulama fuqaha', *bai' al-istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari *bai' as-salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian ketentuan *istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akat *bai' as-salam*. Produk *istishna'* menyerupai produk assalam, namun dalam *istishna'*, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran (Sudarsono, 2005 : 65)".

B. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Prinsip sewa (*ijarah*) berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti (*al-iwadlu*). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2001 : 117).

“Menurut *Ijarah* berarti *lease contract* dan juga *hire contract*. Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah *lease contract*, dimana suatu

bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*) (Sudarsono, 2005 : 66)".

2. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Sumber penghimpunan dana bank syariah dapat diperoleh dari empat sumber, yaitu : modal, titipan, investasi, dan investasi khusus.

A. Modal (Al-Wadiah)

Menurut sudarsono *Al-wadiah* dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip kehendaki (Sudarsono, 2005:57).

Al-wadiah adalah perjanjian antara pemilik barang termasuk uang dengan penyimpanan termasuk bank di mana pihak penyimpanan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Wadiah ini, dibedakan menjadi duajenis, yaitu:

a) Al-wadiah Amanah

"Menurut Sudarsono Prinsip ini adalah prinsip penitipan dimana pihak penyimpanan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan (Sudarsono, 2005 : 57)".

b) Al-wadiah Damamah

"Menurut Sudarsono Prinsip penitipan ini adalah penitipan yang memberikan kuasa kepada pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat atau keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan (Sudarsono, 2005 : 57)".

B. Investasi

Adapun yang menjadi bagian dari investasi yaitu *mudharabah*, *mudharabah mutlaqah*, dan *mudharabah muqayyah*:

1. Al-Mudharabah

“Menurut Sudarsono *Al-mudharabah* yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dan pengusaha (*entrepreneur*). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya atau proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan persetujuan. Pemilik modal tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut terjadi karna penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha” (Sumitro, 2000 : 23).

Dalam aplikasi *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (Sudarsono, 2005 : 59)”.

a) Mudharabah Mutlaqah

“Menurut Makhrus Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemodal (*shohibul maal*) dan pengusaha (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam *mudharabah muthlaqah* ini *shahib al mal* memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada *mudharib* dalam mengelola modal dan usahanya”.

b) Mudharabah Muqayyadah

“menurut Makhrus Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan membiayai dan pelaksanaan tugasnya (Makhrus, 2003 : 19-21)”.

3. Produk Jasa (services)

Adapun yang menjadi bagian dari produk jasa (*service*) yaitu *al-hiwalah*, *ar-rahn*, *al-qard*, *al-wakalah*, dan *al-kafalah*:

a) Al-Hiwalah

“Menurut Sudarsono Kata *hiwalah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti *intiqaal* (perpindahan). Yang di maksud disini adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*muhiil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhal alaihi*). Dalam konsep hukum perdata, *hiwalah* adalah serupa pengambilan alihan utang, atau lembaga pelepasan utang atau penjualan utang atau lembaga penggantian *kreditor* atau penggantian *debitor* (Sudarsono, 2005 : 71)”.

b) Ar-Rahn

“Menurut Antonio bahasa, *rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *alhabsu*, artinya penahan, seperti *ni'matun rahina*, artinya karunia yang tetap dan lestari. Teknis *rahn* menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai yang ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, secara sederhana *rahn* adalah jasa untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan (Antonio, 2001 : 131)”.

c) Al-Qard

“Menurut Antonio *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur *fiqih* klasik, *qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Antonio, 2001 : 131)”.

Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya

dalam empat hal :

- “1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya.
2. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah* atau bagi hasil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui peemotongan gaji (Sudarsono, 2005 : 75)”.

d) Al-Wakalah

“Menurut Sudarsono *Wakalah* atau *wikalah* berarti menyerahkan, pendelegasian, atau pemberian *mandate*. Dalam bahasa arab, hal ini dipahami sebagai *at-tafwidh*. Contoh kalimat, “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian istilah tersebut. Tetapi yang dimaksud

dalam hal ini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan yang di syaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab pihak pemberi kuasa (Sudarsono, 2005:77)".

e) Al-kafalah

"Menurut Sudarsono *Kafalah* merupakan jaminan uang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan (Sudarsono, 2005 : 78)".

2.1.5. Pembiayaan di Bank Syariah

Kegiatan penyaluran dana yang paling penting adalah pemberian pinjaman kepada nasabah atau biasa disebut kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah. Kata pinjaman atau kredit tidak digunakan dalam perbankan syariah karena penggunaan kata tersebut kurang tepat penggunaannya disebabkan dua hal, yaitu :

1. Pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh Islam selain pinjaman seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan lainnya.
2. Dalam Islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersil. Hal ini berarti, apabila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Berdasarkan hadis riwayat Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu adalah haram (antonio, 2001 : 24)

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan pada pasal 1 angka 25 :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*;

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (muhammad, 2000 : 24).

Dalam perbankan syariah mengenai pembiayaan ini data dibagi menjadi

tiga hal penting yaitu :

1. *Return Bearing Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2. *Return Free Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
3. *Charity Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan. Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna'*) dan pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahia bittamlik*), sedangkan untuk pola pinjaman menggunakan dana talangan (*qardh*) (antonio, 2001 : 59).

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan aneka barang, perumahan dan *property*.

2.1.6. Sistem Pembiayaan di Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1). Pembiayaan Produktif,

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluan pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu :

a). Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid, piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

Bank Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyanggah dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha

(*mudharib*). Skema pembiayaan ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

b). Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah :

1. untuk pengadaan barang-barang modal;
2. mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah;
3. berjangka waktu menengah dan panjang;

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*project cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Selain itu, barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran pembiayaan.

Penyusunan proyeksi arus kas ini harus disertai pula dengan perkiraan keadaan-keadaan pada masa yang akan datang, mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang panjang. Untuk memperkirakannya perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan laba rugi (*project balance sheet and project income statement*) selama jangka waktu pembiayaan. Dari perkiraan itu akan diketahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (*solvency*). Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan

dipantau maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema *musyarakah mutanaqishah*. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaan dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru.

Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah *alijarah al muntahabit-tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.

2). Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.

Pada umumnya, bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama (*main collateral*). Adapun untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai *collateral*.

Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari sumber pendapatan lain dan bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini,

1. *Al-bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran.
2. *Al-ijarah al muntahia bit-tamlik* atau sewa beli.
3. *Al-musyarakah mutanaqhishah* dan *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
4. *Ar-rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa (Antonio, 2001 : 168).

Pembiayaan konsumsi tersebut di atas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan, yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pokoknya saja, tanpa imbalan apapun.

2.2. Pengertian dan Jenis Bagi hasil

Dalam dunia perbankan syariah mungkin sering didengar istilah bagi hasil atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *profit sharing* atau *revenue sharing*. Dalam perbankan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku pada produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh, sebagian ataupun dalam bentuk *koorporasi* lainnya.

“Prinsip bagi hasil ini akan berfungsi sebagai mitra bagi penabung, demikian juga pengusaha peminjam dana. Jadi prinsip bagi hasil ini merupakan landasan utama beroperasinya perbankan syariah. Faktor dana merupakan sebuah kebutuhan pokok beroperasinya sebuah perbankan (lembaga keuangan). Dalam perbankan yang mendasarkan pada bagi hasil dalam operasionalisasinya, maka untuk memperoleh hasil (*laba*) adalah dengan melakukan pembiayaan-pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara investor dengan pengelola dana/debitur, dimana diantara keduanya

menyepakati bagiannya masing-masing dari hasil yang diperolehnya (Nurul Hidayat : 2010)”.

2.2.1. Pengertian dan jenis Bagi Hasil

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. “Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah.

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut.

2.3.2. Jenis-jenis Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah secara keseluruhan prinsip dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah akad utama *mudharabah* dan *musyarakah*. Secara umum jenis-jenis bagi hasil yaitu:

1. Mudharabah

Mudharabah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *dharab* yang bermakna memukul, bergerak, pergi, mewajibkan, mengambil bagian, berpartisipasi. Dalam kaitannya dengan pengertian *mudharabah* maka yang lebih cocok adalah mengambil bagian dan berpartisipasi. Adapun menurut istilah ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh:

a. Menurut Sayyid Sabiq

"*Mudharabah*" adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan".

2. Musyarakah

Pembiayaan *Musyarakah* adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara bank (mitra) dan nasabah (mitra) dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/*manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi.

Musyarakah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *syaraka* yang bermakna bersekutu, meyetujui. Sedangkan menurut istilah, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/ expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lewis dan Algaoud juga memberikan definisi *musyarakah* sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk merbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.

2.3. Pengertian dan jenis Syirkah/ Musyarakah

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il-madhi*), *yashruku* (*fi'il-mudhari*) syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); ertinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar) Menurut erti asli bahasa Arab, syirkah bererti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya, (An-Nabhani, 1990 : 140).

Musyarakah (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. Ketentuannya, antara lain :

1. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus sadar hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut :
 - Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan.
 - Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk

melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian yang disengaja.

- seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan dana atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

2.3.1. Jenis- jenis Pembiayaan Musyarakah

Adapun Pembiayaan *Musyarakah* ada dua jenis, yaitu:

1. Musyarakah Pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu *asset* oleh dua orang atau lebih.
2. Musyarakah Akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan.

Menurut An-Nabhani *musyarakah* mempunyai beberapa akad, yaitu :

1. Syirkah Inan adalah syirkah yang mana 2 pihak atau lebih, setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan kerja. Contoh bagi syirkah inan: Khalid dan Faizal berbagi menjalankan perniagaan burger bersama-sama dan masing-masing mengeluarkan modal RP.50.000 setiap seorang. Perkongsian ini diperbolehkan berdasarkan As-Sunnah dan ijma'sahabah. Disyaratkan bahawa modal yang dibagi adalah berupa uang. Modal dalam bentuk harta benda seperti kereta mestilah diadakan pada awal transaksi. Kerja sama ini dibangun oleh konsep perwakilan (wakalah) dan kepercayaan (amanah). Sebab masing-masing pihak, dengan memberi/ berkongsi modal kepada rekan kongsinya berarti telah memberikan kepercayaan dan mewakilkan kepada rekan kongsinya untuk mengelola perniagaan. Keuntungan adalah berdasarkan kesepakatan semua pihak yang bekerja sama manakala kerugian berdasarkan peratusan modal yang dikeluarkan. Abdurrazzak dalam kitab Al-Jami' meriwayatkan dari Ali r.a yang mengatakan: "kerugian bergantung kepada modal, sedangkan keuntungan bergantung kepada apa yang mereka sepakati"
2. Perkongsian abdan adalah perkongsian 2 orang atau lebih yang hanya melibatkan tenaga (badan) mereka tanpa melibatkan perkongsian modal. Sebagai contoh: Jalal adalah tukang buat rumah dan Rafi adalah juru elektrik yang berkongsi menyiapkan projek sebuah rumah. Perkongsian

mereka tidak melibatkan perkongsian kos. Keuntungan adalah berdasarkan persetujuan mereka. Syirkah abdan hukumnya mubah berdasarkan dalil As-sunnah. Ibnu mas'ud pernah berkata "aku berkongsi dengan Ammar bin Yasir dan Saad bin Abi Waqqash mengenai harta rampasan perang badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun" (HR Abu Dawud dan Atsram). Hadith ini diketahui Rasulullah s.a.w dan beliau membenarkannya.

3. Syirkah Mudharabah adalah syirkah dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak menjalankan kerja (amal) sedangkan pihak lain mengeluarkan modal (mal).. Istilah mudharabah dipakai oleh ulama Iraq, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qiradh. (Al-Jaziri, 1996: 42; Az-Zuhaili, 1984: 836). Sebagai contoh: Khairi sebagai pemodal memberikan modalnya sebanyak RM 100 ribu kepada Abu Abas yang bertindak sebagai pengelola modal dalam pasaraya ikan. Ada 2 bentuk lain sebagai variasi syirkah mudharabah. Pertama, 2 pihak (misalnya A dan B) sama-sama memberikan mengeluarkan modal sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan menjalankan kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan kontribusi modal tanpa kontribusi kerja. Kedua-dua bentuk syirkah ini masih tergolong dalam syirkah mudharabah. Dalam syirkah mudharabah, hak melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola. Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam mudharabah berlaku wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.
4. Disebut syirkah wujud kerana didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian (wujud) seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujud adalah syirkah antara 2 pihak (misalnya A dan B) yang sama-sama melakukan kerja (amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang mengeluarkan modal (mal). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudharabah padanya. Bentuk kedua syirkah wujud adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barangan yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak. Misalnya A dan B tokoh yang dipercayai pedagang. Lalu A dan B bersyirkah wujud dengan cara membeli barang dari seorang pedagang C secara kredit. A dan B bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). Dalam syirkah kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan nisbah barang dagangan yang dimiliki. Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pengusaha wujud usaha berdasarkan kesepakatan. Syirkah wujud kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah 'abdan.

Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahawa ketokohan (wajah) yang dimaksud dalam syirkah wajah adalah kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur atau suka memungkiri janji dalam urusan kewangan. Sebaliknya sah syirkah wajah yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah) yang tinggi misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan kewangan.

5. Syirkah mufawadhah adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inan, 'abdan, mudharabah dan wajah). Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis syirkah yang sah berdiri sendiri maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya; iaitu ditanggung oleh pemodal sesuai dengan nisbah modal (jika berupa syirkah inan) atau ditanggung pemodal sahaja (jika berupa syirkah mudharabah) atau ditanggung pengusaha usaha berdasarkan peratusan barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wajah). Contoh: A adalah pemodal, menyumbang modal kepada B dan C, dua jurutera awam yang sebelumnya sepakat bahawa masing-masing melakukan kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk menyumbang modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah syirkah 'abdan iaitu B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan kontribusi kerja sahaja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, bererti di antara mereka bertiga wujud syirkah mudharabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahawa masing-masing memberikan suntikan modal di samping melakukan kerja, bererti terwujud syirkah inan di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya bererti terwujud syirkah wajah antara B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada yang disebut syirkah mufawadhah.
6. Syirkah Al Milk mengandungi arti kepemilikan bersama (co-ownership) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (joint ownership) atau suatu kekayaan (aset). Misalnya, dua orang atau lebih menerima warisan/hibah/wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi. Contoh lain, berupa kepemilikan suatu jenis barang (misalnya, rumah) yang dibeli bersama. Dalam hal ini, para mitra harus berbagi atas harta kekayaan tersebut berikut pendapatan yang dapat dihasilkannya sesuai dengan porsi masing-masing sampai mereka memutuskan untuk membagi atau menjualnya. Untuk tetap menjaga kelangsungan kerja sama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan semua mitra. Dengan kata lain, seorang mitra tidak dapat bertindak dalam penggunaan harta bersama kecuali atas izin mitra yang bersangkutan. Syirkah al milk kadang bersifat ikhtiyariyyah (ikhtiyari/ sukarela/ voluntary) atau jabariyyah (jabari/ tidak sukarela/ involuntary). Apabila harta bersama (warisan/

hibah/ wasiat) dapat dibagi, namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka syirkah al milk tersebut bersifat ikhtiyari (sukarela/ voluntary). Contoh lain dari syirkah jenis ini adalah kepemilikan suatu jenis barang misalnya rumah yang dibeli secara bersama. Namun, apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa harus memilikinya bersama, maka syirkah al milk bersifat jabari (tidak sukarela/ involuntary atau terpaksa). Misalnya, syirkah di antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu, sebelum dilakukan pembagian (An-Nabhani, 1990: 152-154).

2.3.2. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Adapun pengakuan dan pengukuran dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu :

- Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.
- Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian Bank pada saat penyerahan.
- Biaya-biaya yang timbul akibat akad *musyarakah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.
- Pengakuan keuntungan/ pendapatan dan kerugian *musyarakah*:
- Dalam pembiayaan *musyarakah* permanen yang melewati satu periode laporan maka:
 - ✓ Laba diakui pada periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

- ✓ Rugi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*.
- ✓ Apabila dalam pembiayaan *musyarakah* menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*), dimana periode sebelumnya terjadi kerugian, maka keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk memulihkan pengurangan modal akibat kerugian pada periode sebelumnya.
- Pada saat akad pembiayaan *musyarakah* berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra *musyarakah* diakui sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo.
- Apabila terjadi kerugian dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *musyarakah*, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo.
- Pada saat akad diakhiri, saldo pembiayaan *musyarakah* yang belum diterima diakui sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo.
- Penyisihan kerugian pembiayaan dan piutang *musyarakah* harus dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

2.3.4. PENYAJIAN

Adapun yang menjadi penyajian dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu :

- Penilaian pembiayaan *musyarakah* pada akhir periode akuntansi
- Pembiayaan *musyarakah* permanen dinilai sebesar nilai perolehan (jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva pada saat akad) setelah dikurangi dengan kerugian yang telah diakui.
- Pembiayaan *musyarakah* menurun disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra *musyarakah*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah PT Bank Muamalat. Kantor Cabang Makassar, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 72, Makassar.

3.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. dimana:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan atau wawancara secara langsung dengan pegawai yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen atau arsip instansi yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini, khususnya mengenai sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah*.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab

kepada beberapa pihak, baik pimpinan maupun karyawan/ staf yang mengetahui objek pembahasan.

2. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Metode ini merupakan bentuk penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dan mendukung penelitian, dokumen, arsip, dan catatan-catatan penting organisasi yang juga berhubungan dengan penelitian.

3.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang-lebih 1 bulan.

3.5. Metode Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis. Analisis data ini penting karena hasil analisis tersebut dapat memberi informasi penting yang berguna dalam menyelesaikan masalah penelitian. Pada penelitian ini, masalah dibatasi pada perlakuan akuntansi penerapan *bagi hasil pembiayaan* musyarakah pada PT Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Makassar dengan meneliti penerapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah*..

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif Komparatif, yaitu mendeskripsikan kondisi lapangan yang dapat dilihat pada gambaran objek penelitian hasil analisis bagi hasil pembiayaan *musyarakah* kemudian dianalisis lebih lanjut dengan mensyaratkan konsep bagi hasil berbasis nilai Islam, untuk mengetahui apakah penerapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada bank muamalat cabang Makassar telah sesuai dengan nilai Islam dalam berbisnis yang sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah dan Gambaran Umum PT Bank Muamalat Indonesia TBK

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya bunga bank dan perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia.

Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, SH. dengan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413. T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992 Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp 84 miliar. Kemudian dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan dana dari masyarakat Jawa Barat senilai Rp 106 miliar sebagai wujud dukungan mereka.

Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK.013/1992 Tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H. Pada 27 Oktober 1994,

Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa.

Beberapa tahun yang lalu Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara pernah mengalami krisis moneter yang berdampak terhadap perbankan nasional yang menyebabkan timbulnya kredit macet pada segmen korporasi. Bank Muamalat pun ikut terimbas dampak tersebut. Tahun 1998, angka *non performing financing* (NPF) Bank Muamalat sempat mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp 105 miliar dan ekuitas mencapai titik terendah hingga Rp 39,3 miliar atau kurang dari sepertiga modal awal.

Kondisi tersebut telah mengantarkan Bank Muamalat memasuki era baru dengan keikutsertaan Islamic Development Bank (IDB), yang berkedudukan di Jeddah–Saudi Arabia, sebagai salah satu pemegang saham luar negeri yang resmi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 21 Juni 1999.

Dalam kurun waktu 1999-2002 Bank Muamalat terus berupaya dan berhasil membalikkan keadaan dari rugi menjadi laba. Hasil tersebut tidak lepas dari upaya dan dedikasi segenap karyawan dengan dukungan kepemimpinan yang kuat, strategi usaha yang tepat, serta kepatuhan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan kepada sekitar 2,5 juta nasabah melalui 368 kantor layanan yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia dan didukung oleh jaringan layanan di lebih dari 4.000 outlet *System Online Payment Point* (SOPP) di PT POSIndonesia, 32.000 *Automated Teller Machine* (ATM), serta 95.000 *merchant debit*.

Bank Muamalat merupakan satu-satunya bank syariah yang berekspansi ke luar negeri dengan membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia. Nasabah dapat memanfaatkan jaringan *Malaysia Electronic Payment System* (MEPS) dengan jangkauan akses lebih dari 2.000 ATM di Malaysia.

Pelopor perbankan syariah ini selalu berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan mudah dijangkau bagi masyarakat hingga ke berbagai pelosok Nusantara.

Bukti komitmen tersebut telah mendapat apresiasi dari pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional, serta masyarakat luas dengan perolehan lebih dari 70 penghargaan bergengsi selama 5 tahun terakhir.

4.1.2. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional.

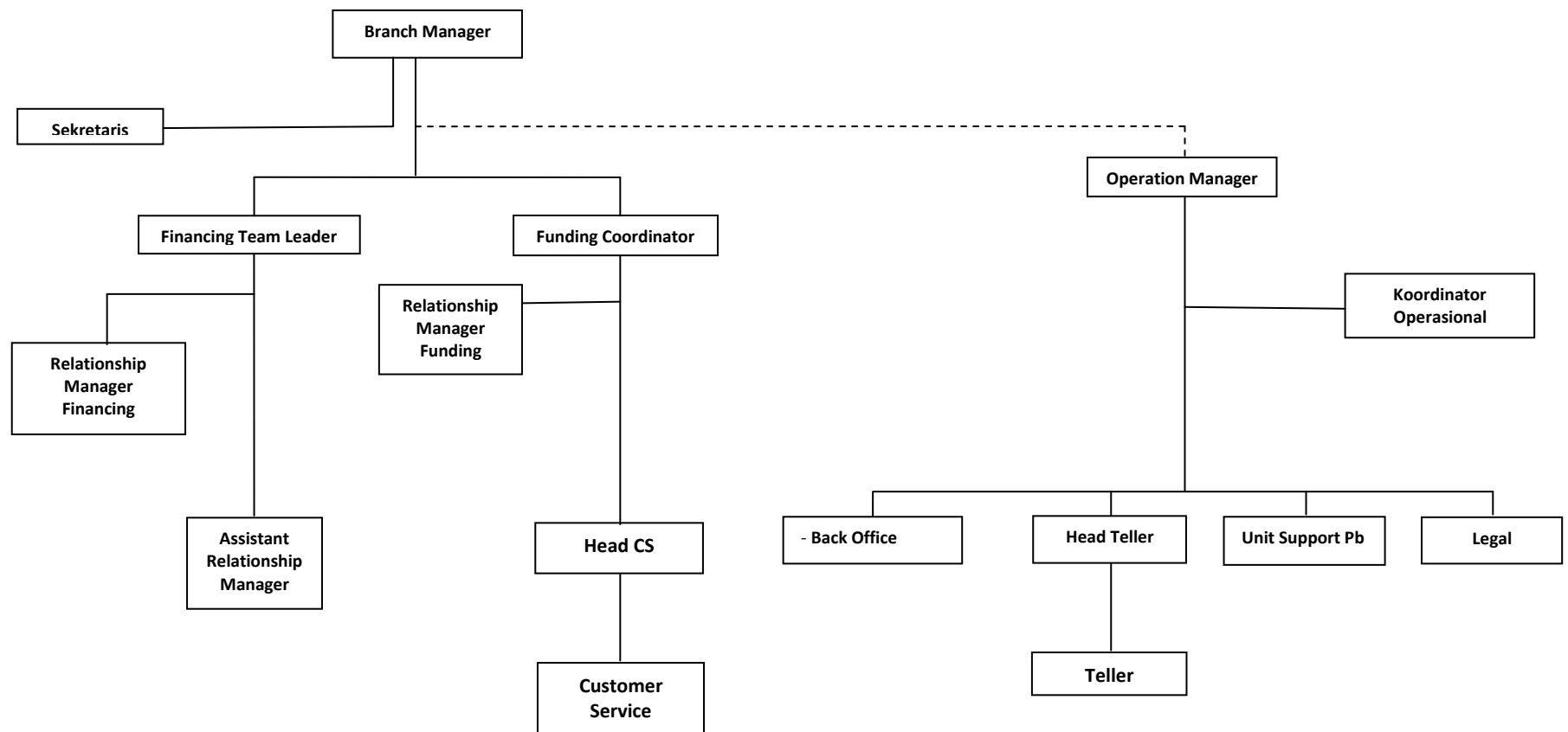
2. Misi

Menjadi *role model* lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada stakeholder.

4.1.3. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar

Adapun yang menjadi nilai kinerja dari Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar diantaranya; struktur organisasi dan pembagian tugas:

STRUKTUR ORGANISASI BANK MUAMALAT CABANG MAKASSAR



4.1.4. Pembagian Tugas

1. Branch Manager

Tujuan : bertanggung jawab pada setiap fungsi divisi dan memastikan bahwa tujuan semua terpenuhi.

2. Relationship Manager Funding

Mencapai target Funding yang telah ditetapkan. Pengumpulan data potensial daerah dan potensial pasar; memberikan pelayanan prima kepada nasabah utama, memasarkan produk dan jasa pelayanan Bank Muamalat Indonesia, melakukan seluruh aktifitas promosi atau sosialisasi produk.

3. Financing Support Unit – CI

Sebagai Credit Investigation: taksasi dan Retaksasi atas jaminan Nasabah, membuat laporan taksasi, mengadakan penyelidikan terhadap jaminan nasabah, membuat dan memonitor pelaksanaan Retaksasi minimal 6 bulan sekali, membuat Laporan Rekonsiliasi Pemeringkatan Nasabah (FPN).

4. Financing Support Unit – Admin

Sebagai Administrasi dokumen-dokumen pembiayaan: menerima, menyimpan, mengeluarkan file pembiayaan dan dokumentasi dari Loan Document dan Safe Keeping serta bertanggung-jawab terhadap kelengkapan file tersebut.

5. Teller

Bertanggung Jawab terhadap seluruh transaksi nasabah yang berhubungan dengan teller. Memberikan pelayanan terhadap nasabah

secara tepat, cermat dan memuaskan, Melaksanakan seluruh transaksi tunai maupun non tunai yang diinstruksikan oleh nasabah.

6. Customer Service

Bertanggung Jawab terhadap seluruh transaksi nasabah yang berhubungan dengan Customer Service.

Melayani nasabah pada waktu pembukaan, penutupan dan perubahan rekening nasabah (giro, tabungan, deposito, DPLK dan lain-lain), melayani dan menyelesaikan berbagai masalah serta complain nasabah, memelihara file pembukaan dan penutupan rekening.

4.1.5. Letak Kantor

Adapun alamat kantor cabang Bank Muamalat ATM dan nomor telpon sekitaran Makassar;

1. Bank Muamalat - Makassar Sam Ratulangi, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 72, Makassar. (0411) 8327777 muamalatbank.com
2. Bank Muamalat - Makassar Pengayoman, Jl. Pengayoman, Komplek Mirah F8, Makassar (0411) 433755 muamalatbank.com
3. Bank Muamalat - Makassar Daya, Jl. Perintis Kemerdekaan, Komplek Bukit Katulistiwa Ruko Blok A No. 7, Makassar, 1346 muamalatbank.com

4.1.6. Neraca dan Laporan Kinerja dalam Perspektif Produknya

Adapun neraca tahun 2011 pada perspektif produknya Bank Muamalat Indonesia :

P.T. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

NERACA

31 DESEMBER 2011

PINJAMAN QARDH

Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan

penghapusan sebesar Rp 21.672.355

tahun 2011 dan Rp 11.888.719 tahun 2010 1.932.534.695

Pihak berelasi – setelah dikurangi

penyisihan penghapusan sebesar Rp 10.859 tahun 2011

dan Rp 19.147 tahun 2010 1.075.090

Jumlah 1.933.609.785

PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan

penghapusan sebesar Rp 65.978.054 tahun 2011

dan Rp 46.093.303 tahun 2010 1.498.296.551

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan

penghapusan sebesar Rp 173.382.017 tahun 2011

dan Rp 121.535.998 tahun 2011 8.137.946.126

Pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan penghapusan sebesar Rp 392.661 tahun 2011 dan Rp 20.082 tahun 2010	<u>38.873.407</u>
Jumlah	8.176.819.533

INVESTASI SAHAM

Pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan penghapusan sebesar Rp 472.878 tahun 2011 dan Rp 471.797 tahun 2010	46.814.933
---	------------

TAGIHAN AKSEPTASI

Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan penghapusan sebesar Rp 1.537.078 tahun 2011 dan Rp 2.422.080 tahun 2010	64.016.516
---	------------

ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH

Pihak ketiga - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 116.227.395 tahun 2011 dan Rp 88.755.186 tahun 2010	325.455.607
--	-------------

ASET TETAP - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 212.243.301 tahun 2011 dan Rp 154.244.124 tahun 2010	317.398.693
---	-------------

ASET PAJAK TANGGUHAN	64.304.142
----------------------	------------

ASET LAIN-LAIN – BERSIH	<u>562.424.418</u>
-------------------------	--------------------

JUMLAH ASET	32.479.506.528
--------------------	-----------------------

KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS KEWAJIBAN

KEWAJIBAN SEGERA 98.407.266

SIMPANAN**Giro wadiah**

Pihak ketiga 2.468.994.040

Pihak berelasi 29.451.325

Jumlah giro wadiah 2.498.445.365

Tabungan wadiah - pihak ketiga 848.320.526

Jumlah 3.346.765.891

SIMPANAN DARI BANK LAIN 119.972.819

BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN 65.716.108

KEWAJIBAN AKSEPTASI 65.553.596

PINJAMAN YANG DITERIMA 326.146.302

HUTANG PAJAK 56.191.673

ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI 8.731.004

KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA 40.027.462

KEWAJIBAN LAIN-LAIN 145.917.077

JUMLAH KEWAJIBAN 4.273.429.198

sumber :annual-report 2011.mumalatbank.com

Bank Muamalat menyalurkan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk keperluan produktif maupun konsumtif, yang dibutuhkan berlandaskan akad atau skema yang dipakai yaitu sebagai piutang jual-beli, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta aset *ijarah*.

Pada akhir tahun 2011, total pembiayaan mencapai sebesar Rp. 22.469,2 miliar dengan jumlah penyisihan penghapusan sebesar Rp.416,4miliar. Jumlah tersebut mencerminkan pertumbuhan sebesar Rp.6.551,5miliar, atau 41,15% dari jumlah pembiayaan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp.15.917,7miliar piutang jual-beli dan pembiayaan berakad bagi hasil masing-masing berkontribusi sebesar 45,72% dan 44,13%, terhadap total pembiayaan akhir tahun 2011 pada lampiran 2 Neraca pada PT Bank Muamalat Indonesia.

✓ Piutang

Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual-beli berdasarkan akad *Mudharabah* dan *istishna* serta piutang pendapatan *Ijarah*, dalam rangka pengadaan barang bagi nasabah untuk kebutuhan produktif dan konsumtif.

Jumlah piutang tumbuh besar Rp.3.66,4miliar, atau 55,75%, dari Rp.6.596,2miliardi akhir tahun 2010 menjadi 2011. Sebagian besar piutang berupa *Mudharabah*, yang tercatat meningkat dari sebesar Rp.6.546,1miliar menjadi sebesar Rp.10.196,7miliar. Kenaikan piutang *Mudharabah* antara lain mencerminkan pertumbuhan pada pembiayaan konsumen termasuk di dalamnya adalah produk pembiayaan hunian syariah, pembiayaan kredit motor, serta pembiayaan multijasa.

✓ Pinjaman *Qardh*

Pembiayaan *qardh* adalah penyediaan dana bagi nasabah dengan pinjaman yang mewajibkan peminjam untuk melunasinya dalam jangka waktu tertentu.

Pada akhir tahun 2011 total pinjaman Qardh tercatat sebesar Rp.1.955,3miliar, meningkat sebesar Rp.759.7miliar, atau 63,53% dari Rp.1.195,6miliar pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan pinjaman Qardh terutama didorong produk dana talangan haji.

✓ Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan kerjasama antara penyedia dana (bank) dan nasabah sebagai pengelola dana untuk modal usaha, dengan bagi hasil yang disetujui bersama. Pembiayaan *mudharabah* sampai akhir tahun 2011 meningkat sebesar Rp.153,6miliar atau 10,89%, menjadi Rp.1.564,3 miliar, dari sebesar Rp.1.410,6 di akhir tahun 2010,

✓ Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam pembiayaan *musyarakah* bank dan nasabah masing-masing punya kontribusi dana untuk modal dalam suatu usaha, dengan bagi hasil yang disetujui bersama. Pembiayaan *musyarakah* membukukan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp.2.250,0miliar, atau 36,88%, dari sebesar Rp.6.100,6miliar, menjadi sebesar Rp.8.350,66miliar, di akhir tahun 2011.

✓ Simpanan

Simpanan terdiri atas giro wadiah dan tabungan *wadiah*. Total simpanan nasabah tumbuh sebesar Rp.832,3 miliar, atau 33,10%, dari Rp.2.514,4

miliar, pada akhir tahun 2010 menjadi sebesar Rp.3.346,8 miliar, di akhir tahun 2011. Giro *wadiah* tumbuh sebesar Rp.305,5 miliar, atau 74,65% dari total simpanan nasabah. Sementara tabungan *wadiah* tumbuh sebesar Rp.526,8 miliar, atau 163,84%, mencapai sebesar Rp.848,3 miliar di akhir tahun 2011.

4.1.7. Laporan Laba Rugi

Adapun laporan laba rugi pada Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

P.T. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

LAPORAN LABA RUGI

UNTUK TAHUN -TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali laba bersih per saham dasar)

2011

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA

OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB

Pendapatan dari penjualan	1.082.687.860
Pendapatan dari bagi hasil	990.648.523
Pendapatan dari ijarah - bersih	45.983.252
Pendapatan usaha utama lainnya	<u>200.413.273</u>

Jumlah Pendapatan

Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	2.319.732.908
---	---------------

HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL

DANA SYIRKAH TEMPORER	<u>(1.156.734.283)</u>
-----------------------	------------------------

HAK BAGI HASIL MILIK BANK	<u>1.162.998.625</u>
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA -	
BERSIH	<u>354.796.740</u>
BEBAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN	
Aset produktif	(125.826.070)
Aset non produktif	<u>(1.697.447)</u>
Jumlah Beban Penyisihan Penghapusan	<u>(127.523.517)</u>
 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	
Beban kepegawaian	(410.355.072)
Beban umum dan administrasi	(498.888.179)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian	
komitmen dan kontinjensi	(3.600.954)
Beban bonus giro wadiah	(21.845.348)
Beban lain-lain	(71.963.413)
Jumlah Beban Operasional	<u>(1.006.652.966)</u>
LABA OPERASIONAL	383.618.882
PENDAPATAN (BEBAN) NON	
OPERASIONAL	
Pendapatan non operasional	20.911.454
Beban non operasional	<u>(32.860.070)</u>
Beban Non Operasional - Bersih	<u>(11.948.616)</u>
 LABA SEBELUM PAJAK	 <u>371.670.266</u>
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	
Pajak kini	(116.190.860)

Pajak tangguhan	<u>18.142.197</u>
Beban pajak - bersih	<u>(98.048.663)</u>
LABA BERSIH	<u>273.621.603</u>
LABA PER SAHAM DASAR **)	<u>185,08</u>

sumber : *annual-report 2011.mumalatbank.com*

Pada tahun 2011, Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* terdiri dari margin keuntungan atas jual-beli dari transaksi *Murabahah*, *Istishna*, pendapatan atas bagi hasil dari *Mudharabah*, *Musyarakah*, pendapatan sewa dari *ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dan pendapatan usaha utama lainnya.

- ✓ Pendapatan *Murabahah* diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.
- ✓ Pendapatan *Istishna* diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.
- ✓ Pendapatan *Ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional. Pendapatan usaha *Mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau

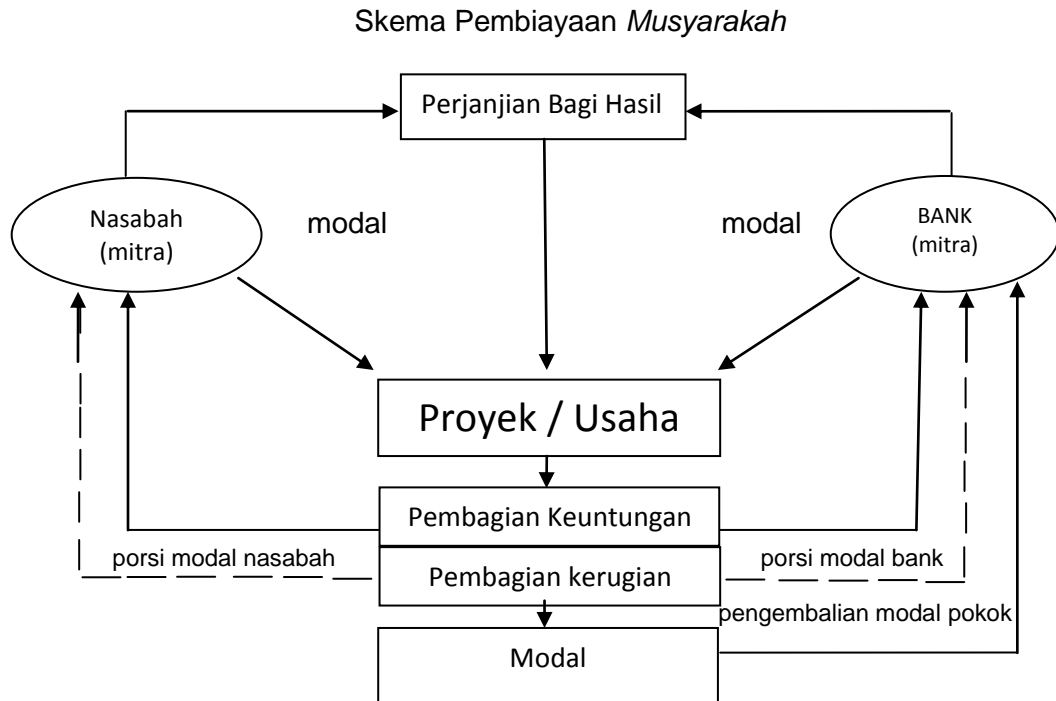
kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *Mudharabah*.

- ✓ Pendapatan usaha *Musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *Musyarakah*. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.
- ✓ Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari penempatan pada Bank Indonesia, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima (*cash basis*).

4.1.8. Skema Pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalat cabang Makassar

Adapun skema *musyarakah* yang ada pada bank Muamalat cabang Makassar dalam menentukan sebuah akad :

Gamabar 5.1.



sumber : muamalatbank

Adapun yang disepakati dalam sebuah akad pembiayaan musyarakah yaitu :

1. Melakukan perjanjian antara nasabah dan bank.
2. Perjanjian yang disepakati dalam bentuk proyek atau usaha yang akan dilakukan oleh nasabah (mitra) dan di pertimbangkan oleh Bank (mitra)
3. Dan menentukan kesepakatan *nisbah*/ pembagian keuntungan dan pembagian kerugian antara nasabah dan Bank sesuai yang disepakati dalam akad.

4. Pengembalian modal pokok pada bank.

4.1.9. Fitur produk Musyarakah

Adapun yang menjadi fitur produk *musyarakah* yaitu:

1. Porsi syirkah nasabah minimal 10%.
2. Kepemilikan bank pindah kepada melalui sewa (akad | *ijarah bittamlik*).
3. Nilai sewa evaluatif setiap 2 tahun, namun sepanjang history tidak pernah ada perubahan nilai sewa.
4. Penentuan nisbah syirkah nasabah dihitung dengan membandingkan porsi nasabah dengan harga obyek yang dikongsikan.
5. Nasabah dapat mempercepat pengambil alihan porsi bank dengan menambahkan nilai sewa kepada bank.

4.2. HASIL PENELITIAN

4.2.1. Prinsip Operasional Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan usaha komersilnya mempunyai tiga prinsip operasional yang terdiri dari :

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun anatara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah* yaitu sistem *revenue sharing*.

2. Sistem Jual beli dengan Margin keuntungan

Sistem ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank mengangkat nasabah sebagai again bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank akan bertindak sebagai penjual akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi bank (*margin/mark-up*). Bentuk produk yang berdasarkan ini adalah *murabahah*, *istishna*, dan atau *salam*.

3. Sistem Fee (jasa)

Sistem ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer dll.

4.2.2. Jenis Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia

Ada beberapa jenis Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar, yaitu :

1. Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah, Bank membeli barang dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Jumlah piutang murabahah pada tahun 2011 sebesar Rp. 3.062.091.724.

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* akad untuk usaha patungan antara bank (mitra) dan nasabah (mitra) untuk membiayai usaha yang halal dan produktif. Jumlah pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2011 sebesar Rp. 173.382.017.

3. Ijarah/ ijarah muntahiyah bittamlik

Ijarah akad sewa menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada *muaajir*. Jumlah piutang *ijarah* pada tahun 2011 sebesar Rp. 209.204.

Ijarah muntahiyah bittamlik Akad sewa menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewa akan berpindah kepada *mustajir*.

4.2.3. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan kerjasama perkongsian yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola modal dalam suatu usahanya dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi yang ditanamkan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain: Industry/manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi.

4.2.4. Penetapan Nisbah pada Bank Muamalat Indonesia

Dalam hal adanya keuntungan ini PT. Bank Muamalat Indonesia ketika akan melakukan penyaluran dana berupa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* kepada pihak yang memerlukan dana telah sesuai dengan syarat-syarat yang ada, yaitu sebagai berikut :

- a. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentasi dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, keuntungan atau laba yang dibagikan adalah setelah dipotong besarnya modal dan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat

Indonesia dilakukan dengan cermat agar tidak terjadi ketidak-jelasan penghitungan sehingga akan membawa pada suatu kontrak/ perjanjian yang tidak sah.

- b. Keuntungan untuk setiap pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia keuntungan yang dibagikan harus sesuai dengan perhitungan yang seadil-adilnya dan sejelas mungkin agar tidak terjadi pada perbuatan *riba'*.
- c. Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase. Faktanya pada PT. Bank Muamalat Indonesia memang nisbah pembagian keuntungan adalah dengan menggunakan persentase, misalnya 30:70%. Nisbah ini ditentukan pada saat akad, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah-pahaman antara bank dengan pihak nasabah dalam pembagian nisbah.
- d. Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.

4.2.5. Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah prinsip bagi hasil, yaitu kerja sama antara beberapa mitra yang masing-masing mitra menyetorkan sejumlah dana (bisa sama atau berbeda) dan memberikan keahlian mereka untuk membuat suatu usaha dan mengelolanya secara bersama-sama. Apabila terdapat keuntungan, sebelumnya dibayarkan untuk biaya-biaya dan dibagi sesama mitra berdasarkan nisbah, apabila terjadi kerugian, kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal masing-masing, yang dimana pembiayaan musyarakah bank sebagai mitra pasif dan nasabah mitra aktif. Dalam pembiayaan *musyarakah* ini, nasabah dan bank sama-sama menyetorkan modal untuk membuat usaha. Tetapi, bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha tersebut.

Nisbah pembiayaan perkongsian merupakan suatu pokok atau bentuk perjanjian bagi hasil antara nasabah dan bank sebagai mitra dalam menentukan kesepakatan, yang dimana dalam menentukan nisbah nasabah dan bank sesuai dengan porsi modal yang dimiliki nasabah dan bank. Misalkan Pak Wahyu membutuhkan dana Rp. 50.000.000 untuk menjalankan usahanya dan Pak Wahyu mempunyai dana Rp. 30.000.000, kemudian bank memberikan dana Rp. 20.000.000, Adapun yang disepakati dalam sebuah akad dalam menjalankan usaha yakni adanya mitra aktif dalam menjalankan usaha. Jadi pembagian porsi antara nasabah dan bank = 60:40. Ketika mendapatkan keuntungan sebesar 15.000.000/ bulan. Adapun biaya gaji, perawatan/kebersihan sebesar Rp. 5.000.000, dan nisbah untuk bank sebesar : $40\% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000$. dan nasabah : $60\% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 6.000.000$.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Analisis kesesuaian Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia dengan Nilai Islam (Al-qur'an dan Al-hadits dan Fatwa DSN MUI)

Dalam Islam adanya praktik bagi hasil pembiayaan perkongsian (*musyarakah*) sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini di buktikan dengan turunnya ayat dalam Al-Qur'an yang berisi tentang ketentuan bagi hasil dan bukti di berlakukannya sistem bagi hasil pada zaman itu dengan peninggalan hadits Muhammad SAW yang berisikan tentang kegiatan perkongsian (*musyarakah*). Hal ini mendandakan bahwa sesungguhnya Islam dalam melakukan segala kegiatan bermuamalah termasuk perkongsian

(*musyarakah*) harus di dasarkan atas kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh agama dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

MUI sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan muslim di Indonesia untuk membina, membimbing, mangayomi serta menjaga kestabilan berkehidupan sesama umat muslim lainnya mengeluarkan fatwa yang mempertegas adanya praktik bagi hasil ini. Dengan dikeluarkannya fatwa-fatwa yang berhubungan tentang pembiayaan perkongsian *musyarakah*, yaitu fatwa MUI tentang bagi hasil atau *musyarakah* yang mengatur segala ketentuan yang berhubungan dengan *musyarakah*. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah.

Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu lembaga mandiri yang berlandaskan prinsip syariah menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits terutama dengan sistem bagi hasil perkongsian (*musyarakah*).

Bahwa untuk mengetahui kesesuaian antara Al-qur'an dan hadits dengan penerapan sistem bagi hasil konsep *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia, maka penulis menganalisis berdasarkan alat ukur yang terdapat dalam ayat-ayat Al-qur'an dan Al-hadist, serta fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tentang pembiayaan *musyarakah* bagi hasil yang kemudian mengkomparasikannya dengan data-data yang terdapat dalam standar produk pembiayaan dan data yang kami temukan berdasarkan hasil diskusi dengan staf yang berpengalaman dalam sistem *revenue sharing (musyarakah)* Dari data yang ada, penulis menemukan beberapa kesesuaian kaidah yang diterapkan

oleh Bank Muamalat Indonesia dalam menerapkan sistem bagi hasil (*musyarakah*):

4.3.2. Analisis kesesuaian Fitur produk/ Mekanisme Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Nilai Islam (Al-Qur'an-Hadits dan Fatwa DSN MUI).

Adapun yang perlu diperhatikan dalam melakukan kerjasama/ berkongsi yaitu fitur produk pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia, yaitu:

1. Porsi syirkah nasabah minimal 10%.
2. Kepemilikan bank pindah kepada melalui sewa (*akad/ ijarah bittamlik*).
3. Nilai sewa evaluatif setiap 2 tahun, namun sepanjang history tidak pernah ada perubahan nilai sewa.
4. Penentuan nisbah syirkah nasabah dihitung dengan membandingkan porsi nasabah dengan harga obyek yang dikongsikan.
5. Nasabah dapat mempercepat pengambil alihan porsi bank dengan menambahkan nilai sewa kepada bank.

Sesuai dengan praktik fitur produk pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia bahwa hal ini disebutkan juga pada fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *musyarakah* yaitu ketentuan umum, berdasarkan sebuah kerjasama yang akan disepakati pada saat akad antara kedua pihak atau lebih, yang dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Dan di Al-qur'an juga sudah dijelaskan pada surah As-Shaad ayat 24:

“sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh” (QS. Shaad: 24).

Yang perlu di tekankan dalam ayat ini bahwa ketika kita menjalankan perserikatan/ berkongsi dalam menjalankan usaha dengan seadil-adilnya, maka kita termasuk dari golongan orang-orang yang tidak rugi, yaitu mengerjakan amal saleh dan hal ini di benarkan dalam islam.

4.3.3. Akad Pembiayaan Musyarakah ditinjau dengan Nilai Islam (Al-Qur'an-Hadits dan Fatwa DSN MUI)

Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), yang dimana terjadinya penawaran dan penerimaan untuk menunjukkan tujuan kontrak akad.

Akad pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia yaitu :

1. Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama yang disepakati oleh mitra.

2. Kerja

Partisipasi mitra dalam bekerja disepakati pada saat akad, pihak bank sebagai mitra pasif dan nasabah sebagai mitra aktif untuk menjalankan usahanya.

3. Keuntungan

Setiap mitra berhak mendapatkan keuntungan dengan porsi modal yang di kongsiikan antara bank dan nasabah yang tertuang pada saat akad.

4. Kerugian

Setiap mitra berhak memberikan kontribusi ketika terjadi kerugian sesuai dengan porsi yang di tertuang pada saat akad.

5. Beban biaya dan persengketaan.

Biaya operasional dan biaya-biaya dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu mitra tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para mitra, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sesuai dengan praktik akad pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia di atas bahwa hal ini disebutkan juga pada fatwa DSN MUI tentang pembiayaan musyarakah yaitu :

A. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

B. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

C. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

D. Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

E. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Adapun yang dijelaskan dalam firman Allah pada surah Al-Maidah,1 :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

4.3.4. Penentuan Bagi Hasil ditinjau dengan Nilai Islam (Al-Qur'an-Hadits dan Fatwa DSN MUI)

Penentuan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia, Pembiayaan *musyarakah* adalah yaitu kerja sama antara beberapa mitra yang masing-masing mitra menyetorkan sejumlah dana (bisa sama atau berbeda) dan memberikan keahlian mereka untuk membuat suatu usaha dan mengelolanya secara bersama-sama. Apabila terdapat keuntungan, sebelumnya dibayarkan untuk biaya-biaya dan dibagi sesama mitra berdasarkan nisbah, apabila terjadi kerugian, kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal masing-masing, yang dimana pembiayaan *musyarakah* bank sebagai mitra pasif dan nasabah mitra aktif. Dalam pembiayaan *musyarakah*, nasabah dan bank sama-sama menyetorkan modal untuk membuat usaha. Tetapi, bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha tersebut. Adapun yang menjadi acuan dalam melaksanakan penentuan tersebut, yaitu :

1. Kejujuran/ *transparan*

Pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia, dipandang secara kejujuran/ transparansi melakukan penawaran dan permintaan (*ijab* dan *qabul*) agar terciptanya sebuah kesepakatan untuk menjalankan sebuah usaha dan nasabah harus menyampaikan laporan periodik untuk menentukan penentuan porsi bagi hasil sesuai kebutuhan yang telah disepakati pada saat akad.

2. Keadilan

Pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia, dipandang secara keadilan bahwa menentukan bagi hasil baik keuntungan

maupun kerugian sesuai dengan proporsi modal sesama mitra yang telah disepakati pada saat akad.

3. Ukhuwah

Pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia, dipandang secara ukhuwah bahwa sesama rekan kongsi/ mitra terjalin pada saat *ijab* dan *qabul* (penerimaan dan penawaran) dan berakhirnya sebuah proyek yang dilakukan oleh sesama mitra khususnya nasabah.

Sesuai dengan praktik penentuan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia di atas bahwa sesuai dengan penentuan bagi hasil (keuntungan dan kerugian) fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *musyarakah*.

Adapun hadits yang menjelaskan dalam menentukan bagi hasil dari HR Ibn dari Ibnu Umar, yang artinya:

“berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”

Hadits ini menegaskan bahwa menyewa atau memanfaatkan tenaga dari buruh atau pekerja adalah diperbolehkan, namun tidak boleh menyingkirkan kewajiban untuk membayar sewa atas manfaat tersebut, bahkan kewajiban untuk membayar sewa harus dilunasi sebelum keringatnya kering.

5.3.4. Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah ditinjau dengan Nilai Islam (Al-Qur'an-Hadits dan Fatwa MUI)

Penerapan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu penyaluran dana kepada masyarakat khususnya memberikan modal, yang dimana membentuk sebuah organisasi usaha untuk menjalankan usaha dengan proporsi modal yang sama atau tidak sama.

Adapun yang menjadi acuan dalam menerapkan pembiayaan musyarakah, yaitu :

1. Adanya para pihak yang bekerja sama
2. Adanya modal
3. Adanya usaha atau proyek
4. Adanya pernyataan kesepakatan (*ijab* dan *qabul*)

Para rekan kongsi bekerja sama harus kompeten dalam memberikan sumbangsih dalam menjalankan usahanya baik itu dalam bentuk modal dan pekerjaan.

Adapun juga yang menjadi syarat dalam menjalankan pembiayaan musyarakah, yaitu :

1. Orang yang berakal sehat, dewasa dan cakap dalam bertindak hukum atau diwakilkan.
2. Obyek akad adalah hal-hal yang dapat di wakikan agar memungkinkan setiap anggota syirkah bertindak hukum atas nama seluruh anggota.
3. Para pihak melakukan perjanjian suka rela.
4. Pembagian keuntungan ditentukan pada saat terjadinya akad.

5. Modal yang yang disatukan antara sesama mitra.

Adapun Kaidah Fiqh yang menjadi acuan untuk menjalankan pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia :

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, yang dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah”

Sesuai dengan praktik penentuan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia di atas bahwa sesuai dengan ketentuan umum fatwa DSN MUI tentang pembiayaan musyarakah.

Adapun hadis *qudsi* yang diriwayatkan dari pada Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah SAW meriwayatkan bahawa Allah SWT berfirman:

"Aku adalah orang ketiga bersama-sama dengan rakan kongsi, selama masing-masing mereka tidak mengkhianati yang lain. Jika salah seorang mengkhianati yang lain, maka aku meninggalkan mereka berdua." (riwayat Abu Daud dan Hakim).

Hadits diatas sudah jelas menjelaskan ketika melakukan sebuah kerjasama antara dua atau lebih, selama diantara mereka tidak terjadi perselisihan, maka jalannya itu di ridhai Allah.

Bahwa penerapan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan nilai Islam (Al-Qur'an dan Hadits) dan Fatwa DSN MUI tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Fitur Produk yang menjadi acuan dalam prasyarat untuk melakukan pembiayaan yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar, ditinjau dari segi hukum Islam sudah sah karena telah sesuai dengan ketentuan umum yang telah disusun oleh MUI yang di rangkum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah dan telah sesuai dengan nilai Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

Akad *musyarakah* terdiri dari modal, kerja, keuntungan, kerugian dan beban biaya yang dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar, di tinjau dari segi hukum Islam sudah sah karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad, sudah ada pedoman pelaksanaannya yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah dan telah sesuai dengan nilai Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

Penentuan bagi hasil pembiayaan musyarakah yang di terapkan Bank Muamalat Indonesia cabang makassar terdiri dari kejujuran/ *transparan*, keadilan dan ukhuwah, hal ini menunjukkan bahwa penentuan bagi hasil tersebut telah

sesuai dengan ketentuan umum yang telah disusun oleh MUI yang di rangkum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah dan telah sesuai dengan nilai Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

Acuan dalam penerapan bagi hasil terdiri dari Adanya para pihak yang bekerja sama terdiri dari modal, usaha atau proyek dan pernyataan kesepakatan (*ijab* dan *qabul*) pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar, ditinjau dari segi hukum Islam sudah sah karena telah sesuai dengan ketentuan umum dan ketentuan penutup yang di rangkum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah dan telah sesuai dengan nilai Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Makassar, saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan perlu disosialisasikan sistem operasional Bank Muamalat Indonesia menyangkut metode bagi hasil pembiayaan perkongsian dan berbagai produk yang ditawarkan, baik dalam seminar, simposium, lokakarya, turun langsung ke pengusaha kecil, maupun pendidikan di sekolah dan pesantren. Harapannya adalah agar pemahaman tentang metode bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dan produk syariah lainnya yang anti riba dan adil dalam memabantu rakyat menengah kebawah tidak terbatas pada tekstual di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, akan tetapi dipahami secara lebih mendalam tentang filosofinya serta implementasinya dalam sosial ekonomi, khususnya Bank Muamalat Indonesia

sebagai alternatif yang lebih adil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi para pengusaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Al-hadits.

An-Nahbani Tagyuddin, 1996 M/An Nidlam, Al Iqtishadi Fil Islam diterjemahkan oleh Magfur Wachid, Mohammad, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Risliah Gusti, Surabaya.

Annual-report, 2011. *Muamalatbank.com*

Anifa. 2009. *Pengaruh Profit sharing dan suku bunga terhadap kinerja bank syariah di Indonesia*. MALANG: Skripsi Jurusan pendidikan IPS prodi ekonomi Fakultas Tarbiyah Universitas Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim.

Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Gema Insani Press. Jakarta.

Daud Ali Mohammad, 2001. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Edisi Pertama. Makassar.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah.

Hidayat, Nurul. 2010. *Profit sharing dan revenue sharing*. (Online) <http://tukarpena.blogspot.com/2010/12/profit-sharing-and-revenue-sharing.html>. Diakses pada tanggal 9 juni 2012.

Himpunan Fatwa Dewan syari'ah, 2003.edisi kedua. Jakarta.

Heathfiel, M. Susan. 2010. (Online) http://humanresources.about.com/od/glossary/p/g/profit_sharing.htm. Diakses pada tanggal 20 juni 2012.

- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. 2000. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Khoiriyah, Muchdarsyah. 1991. *Prinsip syariah* www.perbankansyariah.com. Ensiklopedia Islam. Jakarta.
- Mahkrus. 2003. *Produk penghimpunan dana investasi (mudharabah muqayyah)*. www.perbankansyariah.com. Jakarta.
- Manan, Abdul. 1997. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. PT Dana Bakti Prima Yasa. Yogyakarta
- Moerdiyanto. 2004. *Aktualisasi sistem ekonomi dan perbankan syariah (Jurnal Ilmu Manajemen)*. UII Press. Yogyakarta.
- Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud, 2004. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Prospek*. PT. serambi Ilmu Semesta Cetakan kedua. Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad. 2000. *Sistem Dan Operasional Bank Islam*. PT. Raja Grafindo Persada. Yogyakarta.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Cetakan Pertama UII Press. Yogyakarta
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. UII Press. Yogyakarta
- Muhammad. 2001. *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. UII Press. Yogyakarta.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Penerbit Ekonosia Fakultas Ekonomi. UII Press. Yogyakarta.

- Muhammad. 2006. *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. UII Press. Yogyakarta.
- Muhammad, Antonio, Syafi'i. 2000. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Ummat*. Tazkia Institute. Jakarta.
- Sumitro. 2000. *Produk penghimpunan dana (investasi)*. www.perbankansyariah.com. Ensiklopedia Islam. Jakarta.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonesia. Yogyakarta.
- Sudarsono. 2005. *Prinsip jual beli* www.perbankansyariah.com. Ensiklopedia Islam. Jakarta.

LAMPIRAN 1

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Ario Wahyudi
Tempat, Tanggal Lahir : Kolaka, 18 Februari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : Budi Daya Permai, Blok G 19. P. Kemerdekaan
Telpon Rumah dan HP : 085299777104
Alamat *E-mail* : ariowahyudi@rocketmail.com

Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal
 - 1993-1994 : TK Islam, Kolaka Sul-Tra
 - 1994-2001 : SDN 3 Kolaka Sul-Tra
 - 2001-2004 : SMP Immim Putra Makassar
 - 2004-2007 : SMA Immim Putra Makassar
 - 2007-2013 : Jurusan Akuntansi, Universitas Hasanuddin
- Pendidikan Nonformal
 -

Pengalaman

- Organisasi
 - Osis SMA / Kord. IPTEKS (2005-2006)
 - Ketua Konsulat ISSECA (2005-2006)
 - IMA / Anggota (Ikatan Mahasiswa Akuntansi) (2008-2009)
 - Senat FE-UH / Anggota (2009-2010)
 - Senat FE-UH / Anggota (2010-2011)
 - IAPIM / Kord. 2 (Ikatan Alumni Pesantren Immim) (2011-2013)
- Kerja

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya

Makassar, 18 Agustus 2013

Ario Wahyudi

LAMPIRAN 2

P.T. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

NERACA

31 DESEMBER 2011

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali data saham)

	<u>2011</u>
ASET	
KAS	438.053.383
GIRO PADA BANK INDONESIA	1.344.423.594
GIRO PADA BANK LAIN - setelah dikurangi penyisihan penghapusan sebesar Rp 5.357.463 tahun 2011 dan Rp 3.901.441 tahun 2010	357.383.234
GIRO PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) setelah dikurangi penyisihan penghapusan sebesar Rp 4.062 tahun 2011 dan Rp 16.229 tahun 2010	402.097
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN	
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan penghapusan sebesar Rp 405.795 tahun 2011 dan Rp 477.063 tahun 2010	<u>6.008.373.817</u>
Pihak berelasi - setelah dikurangi penyisihan penghapusan sebesar Rp 14.512 tahun 2010	<u>6.008.373.817</u>
EFEK-EFEK - setelah dikurangi penyisihan penghapusan sebesar Rp 720.000 tahun 2011 dan Rp 350.000 tahun 2010	1.223.127.397

PIUTANG

Piutang murabahah - setelah dikurangi Murabahah pendapatan
margin ditangguhkan

sebesar Rp 3.062.091.724 tahun 2011

dan Rp 1.981.509.323 tahun 2010

Pihak ketiga - setelah dikurangi

penyisihan penghapusan sebesar Rp 153.555.961 tahun 2011

dan Rp 104.278.203 tahun 2010 10.016.846.494

Pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan penghapusan

sebesar Rp 262.785 tahun 2011 dan Rp 234.279 tahun 2010 26.015.699

Jumlah 10.042.862.193

Piutang Istishna - setelah dikurangi

penyisihan penghapusan sebesar Istishna Rp 940.714

tahun 2011 dan Rp 901.426 tahun 2010 74.992.864

Piutang pendapatan Ijarah – setelah dikurangi penyisihan

penghapusan Ijarah sebesar

Rp 209.024 tahun 2011 dan Rp 28.073 tahun 2010 747.771

Jumlah 10.118.602.828

PINJAMAN QARDH

Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan

penghapusan sebesar Rp 21.672.355

tahun 2011 dan Rp 11.888.719 tahun 2010 1.932.534.695

Pihak berelasi – setelah dikurangi

penyisihan penghapusan sebesar Rp 10.859 tahun 2011

dan Rp 19.147 tahun 2010	<u>1.075.090</u>
Jumlah	1.933.609.785
PEMBIAYAAN MUDHARABAH	
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan	
penghapusan sebesar Rp 65.978.054 tahun 2011	
dan Rp 46.093.303 tahun 2010	1.498.296.551
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan	
penghapusan sebesar Rp 173.382.017 tahun 2011	
dan Rp 121.535.998 tahun 2011	8.137.946.126
Pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan	
penghapusan sebesar Rp 392.661 tahun 2011	
dan Rp 20.082 tahun 2010	<u>38.873.407</u>
Jumlah	8.176.819.533
INVESTASI SAHAM	
Pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan	
penghapusan sebesar Rp 472.878 tahun 2011	
dan Rp 471.797 tahun 2010	46.814.933
TAGIHAN AKSEPTASI	
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan	
penghapusan sebesar Rp 1.537.078 tahun 2011	
dan Rp 2.422.080 tahun 2010	64.016.516
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH	
Pihak ketiga - setelah dikurangi akumulasi	
penyusutan sebesar Rp 116.227.395 tahun 2011	
dan Rp 88.755.186 tahun 2010	325.455.607

ASET TETAP - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 212.243.301 tahun 2011 dan Rp 154.244.124 tahun 2010	317.398.693
ASET PAJAK TANGGUHAN	64.304.142
ASET LAIN-LAIN – BERSIH	562.424.418
JUMLAH ASET	<u>32.479.506.528</u>

KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS KEWAJIBAN

KEWAJIBAN SEGERA	98.407.266
SIMPANAN	
Giro wadiah	
Pihak ketiga	2.468.994.040
Pihak berelasi	<u>29.451.325</u>
Jumlah giro wadiah	2.498.445.365
Tabungan wadiah - pihak ketiga	<u>848.320.526</u>
Jumlah	<u>3.346.765.891</u>
SIMPANAN DARI BANK LAIN	119.972.819
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	65.716.108
KEWAJIBAN AKSEPTASI	65.553.596
PINJAMAN YANG DITERIMA	326.146.302
HUTANG PAJAK	56.191.673
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	8.731.004
KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA	40.027.462
KEWAJIBAN LAIN-LAIN	<u>145.917.077</u>
JUMLAH KEWAJIBAN	<u>4.273.429.198</u>

DANA SYIRKAH TEMPORER TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

BUKAN BANK

Tabungan mudharabah

Pihak ketiga	6.060.522.578
Pihak berelasi	<u>4.722.698</u>
Jumlah	<u>6.065.245.276</u>

Deposito berjangka mudharabah

Pihak ketiga	17.064.708.766
Pihak berelasi	181.366.438
Jumlah	<u>17.246.075.204</u>

Jumlah dana syirkah temporer dari bukan bank	<u>23.311.320.480</u>
--	-----------------------

BANK BANK :

Tabungan mudharabah (ummat)	89.496.619
Deposito berjangka mudharabah	<u>2.379.067.079</u>

Jumlah dana syirkah temporer dari bank	2.468.563.698
--	---------------

Surat berharga yang diterbitkan :

Investasi mudharabah antar bank	45.337.500
Sukuk mudharabah subordinasi	313.454.447
Jumlah surat berharga yang diterbitkan	<u>358.791.947</u>

JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	<u>26.138.676.125</u>
------------------------------	-----------------------

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham

seri A dan seri B, serta Rp 500 per saham seri C Rp 500	
Modal dasar - 106.126.382 saham	
seri A, 59.203.453 saham seri B 3.569.340.330 saham seri C tahun 2011 dan 2010	
Modal ditempatkan dan disetor penuh –	
106.126.382 saham seri A 59.203.453 saham seri B 1.313.027.055	
saham seri C tahun 2011 seri A, 59.203.453	
saham seri B 1.234.674.717	
saham seri C tahun 2010	821.843.363
Tambahan modal disetor	
513.731.161 Keuntungan belum direalisasi	
dari perubahan nilai efek tersedia untuk dijual	61.187.365
Saldo laba :	
Ditentukan penggunaannya	348.512.902
Tidak ditentukan penggunaannya	<u>322.126.414</u>
JUMLAH EKUITAS	<u>2.067.401.205</u>
JUMLAH KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH	
TOTAL TEMPORER DAN EKUITAS	<u><u>32.479.506.528</u></u>
<i>Sumber : annual-report2011.muamalatbank.com</i>	

LAMPIRAN 2

Pertanyaan Wawancara

Untuk menunjang kelancaran penelitian maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang menyangkut produk pembiayaan perkongsian *musyarakah* kepada orang yang berpengalaman dalam bidangnya. Antara lain:

1. Jelaskan apa maksud dari bagi hasil?
2. Sebutkan dan jelaskan jenis pembiayaan yang terdapat dalam bagi hasil?
3. Kenapa lebih menggunakan metode *revenue sharing* dari pada profit sharing pada Bank Muamalat Indonesia?
4. Jelaskan nisbah bagi hasil *revenue sharing* pada Bank Muamalat Indonesia?
5. Jelaskan nisbah bagi hasil *pembiayaan musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia?
6. Produk apa saja yang terdapat pada metode pembiayaan *musyarakah*?
7. Apakah pembiayaan *musyarakah* ini benar-benar anti Riba dan Bunga?
8. Dari mana Bank mendapat keuntungan dari pembiayaan *musyarakah*?